



**PEMERINTAH KOTA  
DENPASAR**

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)  
TAHUN 2015**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**





DENPASAR & M  
**DENPASAR**  
SATU *genggaman*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2015 ini dapat diselesaikan sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban atas mandat yang diterima, dan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Indonesia, baik berupa Undang-Undang, Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri.

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur. Karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi system pemerintahan dari sistem yang birokratis kearah system yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sector pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (inputs oriented Accountability), menjadi yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar ini tidak terlepas dengan kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut dengan langkah-langkah antisipatif melalui koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Mudah-mudahan LAKIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, Maret 2015

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Denpasar

**I Dewa Made Agung, SE, M.Si**

Pembina TK. I

NIP. 19660525 199303 1 010



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**





<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	Melalui <b>PRDENPASAR</b> selain melakukan pengabdian, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....		<b>iv</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....		<b>v</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<i>Apakah langsung dapat diakses melalui mobile?</i>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....		1
1.2 Dasar Hukum.....		3
1.3 Ruang Lingkup.....		4
1.4 Isu Strategik.....		4
1.5 Struktur Organisasi.....		13
1.6 Sistematika Penulisan.....		15

<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....		<b>16</b>
2.1 Rencana Strategis.....		16
2.2 Perjanjian Kinerja.....		19

<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....		<b>20</b>
3.1 Target dan Analisis Target Renstra.....		20
3.2 Capaian Kinerja Sasaran.....		21
3.3 Analisis Capaian Kinerja.....		27
3.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.....		49
3.5 Penghargaan Kominfo.....		66

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....		<b>69</b>
4.1 Simpulan.....		69
4.2 Langkah Perbaikan.....		70





# DAFTAR TABEL

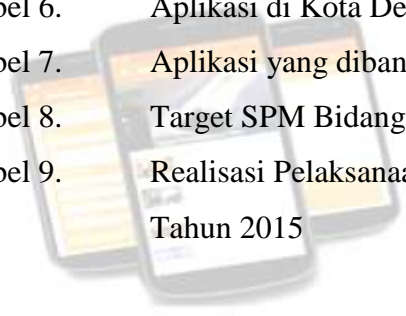


- Tabel 1. Strategi Pengembangan E-Government di Kota Denpasar
- Tabel 2. Target Renstra
- Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo
- Tabel 4. Penjabaran Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo
- Tabel 5. Aplikasi yang dibangun di Tahun 2015
- Tabel 6. Aplikasi di Kota Denpasar Tahun 2011-2015
- Tabel 7. Aplikasi yang dibangun Kominfo 2011-2015
- Tabel 8. Target SPM Bidang Komunikasi dan Informatika
- Tabel 9. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2015

*PRODENPASAR - selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar*



**KINI HADIR PRODENPASAR**  
DENGAN TAMBAHAN VIDEO - FITUR BARU NYA



**RESPON CEPAT APARATUR**  
DENGAN PRODENPASAR



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**





## DENPASAR & M DENPASAR SATU *genggam*

### IKHTISAR EKSEKUTIF



Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Dalam upaya itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar melalui Indikator sasaran.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar, pada tahun 2015 diharapkan Capaian Indikator sasaran mencapai Target yang diharapkan. Adapun Indikator sasaran, dengan rincian :

1. Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar
2. Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar
3. Persentase penerapan e-government / aplikasi pemerintah
4. Jumlah sistem informasi / aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun
5. Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu
6. Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika
7. Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK

capaian kinerja yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran melalui indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan diperoleh hasil, bahwa seluruh sasaran dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dengan dapat

dikategorikan baik sekali. Keberhasilan ini tidak luput dari kendala atau hambatan yang dihadapi. Pada tahun-tahun mendatang telah dipersiapkan strategi-strategi untuk selalu memperoleh hasil capaian kinerja yang semakin baik.



**SATU** genggaman



Melalui **PRODENPASAR+** selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info *Seputar Denpasar*

**KINI HADIR PRODENPASAR+ DENGAN TAMBAHAN FITUR-FITUR BARUNYA**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. Salah satu perkembangan dalam dunia Teknologi Informasi, khususnya pada pemakaian Internet yang berhubungan dengan proses pemerintahan dan pelayanan publik adalah *e-Government*. *E-Government*, sebagai sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, tetapi pengertian maupun penerapannya di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi masing-masing negara. *E-Government* didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pemanfaatan *e-Government* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan internal pemerintah sendiri. Di era sistem birokrasi yang rumit dan kaku ini, pemanfaatan *e-Government* merupakan salah satu upaya untuk mengatasi sistem birokrasi tersebut. Berbagai keuntungan dan manfaat dapat diperoleh melalui pengembangan *e-Government* diantaranya: (i) *e-Government* dapat menciptakan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi interaksi antar instansi/antar lembaga, masyarakat dan juga masyarakat internasional (ii) *e-Government* mampu menyediakan sistem manajemen yang berjaringan sehingga mampu memperpendek lini pengambilan keputusan dan memperluas rentang kendali, (iii) *e-Government* dapat mendobrak dinding pemisah antara pemerintah dan masyarakat dan terutama pemerintah dan sektor swasta, (iv) *e-Government* dapat membantu pemerintah dalam memberikan layanan publik dengan lebih informatif, efisien dan efektif.

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, tatanan hukum yang baik (*rule of law*), ketanggapan, *equity*, dan visi strategis merupakan prinsip-prinsip yang harus dicapai dalam pelaksanaan *good governance*. Dari beberapa daerah

yang telah lebih dahulu melaksanakan praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik diperoleh hasil bahwa praktek-praktek *good governance* yang dilaksanakan secara nyata mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel serta sistem pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Amanat Undang-Undang ini menunjukkan bagaimana pentingnya efisiensi dan transparansi, sehingga e-government sangat sejalan dengan pengamalan Undang-Undang dimaksud, dimana informasi memegang peranan penting dari segenap kegiatan, apalagi bangsa kita akan memasuki era baru yang ditandai dengan keterbukaan dan persaingan bebas. Era baru itu, akan berpengaruh tidak saja di bidang ekonomi, tetapi juga dalam segi-segi kehidupan kita yang lebih luas lagi. Untuk menghadapinya, kita dituntut untuk membangun ketangguhan nasional di segala bidang. Tentunya, ketangguhan nasional itu hanya mungkin terwujud jika semua pelaku pembangunan mempunyai kesiapan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Kota Denpasar mau tak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang menjanjikan efisiensi yang tinggi dan pelayanan yang lebih baik. Untuk itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2015 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2015 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah Kota Denpasar;

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2015 mengacu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 yang memuat visi - misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015 dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2015.

Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar tahun 2015 dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi-strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang bermuara pada terwujudnya Misi dan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar.

### 1.4 Isu Strategik

Visi Pemerintah Kota Denpasar, seperti yg tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Denpasar yaitu "Terciptanya Kota Denpasar Berwawasan Budaya dengan Keharmonisan dalam Keseimbangan secara Berkelanjutan", secara filosofis dilandasi filsafat Tri Hita Karana yaitu harmoni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Kerangka filosofis ini diadopsi dan diadaptasi menjadi kerangka dasar keseluruhan aspek pembangunan Kota Denpasar. Dengan Prioritas Pembangunan diletakkan pada sektor Budaya, Pariwisata, perdagangan, jasa, industri dan sektor pertanian sebagai sektor unggulan (Core Competency) dan mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan dan

pemberdayaan ekonomi lokal dengan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui sistem ekonomi kerakyatan.

Terkait dengan visi dan prioritas pembangunan tersebut, Maka dalam mewujudkan pemerintahan yang Good Governance salah satu upaya yang telah dilakukan dengan menggunakan TIK adalah e-Government. Visi e-Government Kota Denpasar sejalan dengan visi dan prioritas pembangunan di atas yaitu “Menjadi Kota yang Unggul dan Prima dalam penyelenggaraan pemerintahan (Government), pelayanan publik (Citizen) dan ketahanan ekonomi (Business) yang Berwawasan Budaya.

Dari visi ini dapat diterjemahkan bahwa e-Government yang diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Kata unggul mengandung makna upaya nyata peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan masyarakat, sedangkan kata prima mengandung makna efisien, efektif, adil dan transparan, dimana hal ini dapat diwujudkan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain visi dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Denpasar tersebut, perlu juga diselaraskan dengan sasaran umum, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan Telematika yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kota Denpasar. Adapun sasarannya adalah mengembangkan jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar yang mengacu pada Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar. secara optimal telah mampu menyeimbangkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kondisi sekarang, namun untuk menjaga keutuhan sistem teknologi serta untuk pengembangan jaringan informasi terpadu perlu dilakukan peningkatan dalam pemeliharannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pengelolaan serta untuk peningkatan sistem teknologi, informasi dan Komunikasi sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai terutama masalah Sumber Daya Manusia (SDM), Hardware dan Software. Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar nantinya dapat berperan secara aktif dalam pembangunan Kota Denpasar utamanya dalam dunia Teknologi Informatika dan Komunikasi di Kota Denpasar.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pengembangan Bidang Komunikasi Informasi serta pos dan telekomunikasi ada beberapa komponen pokok yang akan dianalisis yaitu sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak/aplikasi, jaringan komputer/Internet, Data dan Informasi, pelayanan masyarakat, organisasi. Komponen tersebut dianalisis letak kekuatannya (*Strengths*), kelemahannya (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*). Analisis SWOT ini dipakai sebagai dasar penentuan rencana pengembangan e-Government.

Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi untuk berbenah diri membangun sistem e-Government yang handal dan terpadu. Selain itu, dengan analisis SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan mengembangkan e-Government. Strategi pengembangan e-Government menurut prioritas selanjutnya dapat dibangun berdasarkan analisis SWOT yang telah disusun, disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di Pemerintah Kota Denpasar.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**Tabel 1**  
**Strategi Pengembangan E-Government di Kota Denpasar**

Komponen	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
<b>Sumber Daya Manusia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kesadaran dari SDM mengenai perlunya Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik</li> <li>Terdapat SDM yang peduli dengan pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kota</li> <li>Adanya rekrutmen SDM berlatar belakang pendidikan komputer dalam formasi CPNS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prosentase penguasaan dan penggunaan teknologi informasi masih rendah</li> <li>Masih rendah SDM berlatar belakang pendidikan komputer</li> <li>Belum terorganisirnya SDM berlatar belakang pendidikan komputer</li> <li>Frekuensi bimbingan teknis SDM tentang teknologi informasi masih rendah dan tidak kontinyu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banyak sumber dan narasumber untuk proses pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>Teknologi Informasi semakin siap pakai dan berdaya guna</li> <li>Terdapat tenaga ahli yang kompeten dengan pengembangan e-Government</li> <li>Banyaknya perguruan tinggi komputer yang dapat melakukan link and match</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat</li> <li>Kurangnya penguasaan pemanfaatan teknologi informasi akan mengakibatkan tertinggal dari daerah lain</li> <li>SDM menggunakan teknologi informasi khususnya Internet dengan tidak produktif</li> </ol>

Komponen	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
<b>Perangkat Keras</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semua instansi telah memiliki komputer dengan jumlah yang beragam</li> <li>Terdapat beberapa komputer <i>server</i> yang memadai</li> <li>Hampir semua H/W sudah dioperasikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perawatan H/W kurang diperhatikan</li> <li>Kebanyakan tidak punya penanggung jawab kerusakan</li> <li>Belum memiliki SOP penanganan perangkat keras</li> <li>Belum memiliki Network Operation Center (NOC) sebagai sentralisasi seluruh server</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Harga H/W relatif semakin murah dan H/W mudah di upgrade</li> <li>Komputer sudah dianggap sebagai kebutuhan standar</li> <li>Kemampuan dan dayaguna H/W semakin canggih dan lengkap</li> <li>Mudah didapatkan di pasaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan H/W sangat pesat sehingga H/W yang ada cepat ketinggalan jaman</li> <li>Kemajuan teknologi S/W berdampak pada kebutuhan H/W yang canggih</li> <li>Meningkat jumlah data membutuhkan media penyimpanan yang besar</li> </ol>
<b>Perangkat Lunak / Aplikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pernah meraih peringkat 3 Nasional dalam implementasi <i>e-Government</i></li> <li>Website sudah menggunakan Content Management System</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan S/W masih parsial belum terintegrasi dan terpadu</li> <li>Belum terdapat urutan prioritas dalam pengembangan aplikasi</li> <li>Belum ada sistem yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S/W semakin mudah dipelajari (<i>user friendly</i>)</li> <li>Kemampuan S/W semakin canggih</li> <li>Ketersediaan S/W semakin lengkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan S/W sangat cepat</li> <li>S/W mutakhir selalu menuntut H/W yang canggih</li> <li>Gencarnya pemberantasan software bajakan</li> <li>Kebijakan pemerintah pusat mengharuskan menggunakan</li> </ol>

Komponen	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	<p>(CMS) untuk seluruh instansi</p> <p>3. Sudah ada aplikasi untuk mendukung perijinan dan lelang</p> <p>4. Sudah memanfaatkan aplikasi mobile (SMS)</p>	<p>terpadu (single sign-on system)</p> <p>4. Paket program ada yang masih bajakan</p>	<p>4. Banyak perusahaan dan perguruan tinggi komputer pembuat software</p> <p>5. Tersedianya open source software (OSS)</p>	<p>open source software (OSS)</p> <p>Aparatur langsung mendapatkan notifikasi melalui mobile</p>
<b>Jaringan / Internet</b>	<p>1. Seluruh SKPD telah mempunyai jaringan <i>intranet</i> dan <i>Internet</i>.</p> <p>2. Ada keinginan untuk mengintegrasikan data-data untuk kepentingan pelayanan publik lewat jaringan</p> <p>3. Lokasi seluruh instansi dapat terjangkau baik lewat jaringan kabel (Fiber Optic) maupun wireless</p>	<p>1. Sedikit sekali instansi yang memiliki tenaga administrator ataupun operator jaringan yang handal</p> <p>2. Penguasaan komputer dan Internet, baik pimpinan maupun staf masih rendah</p>	<p>1. Teknologi jaringan sudah murah dan mudah didapat di pasaran.</p> <p>2. Pengembangan aplikasi jaringan sudah lebih mudah dan cepat.</p> <p>3. Database terpusat maupun tersebar sangat mudah diimplementasikan.</p>	<p>1. Masyarakat sudah melek <i>internet</i>, membuat mereka lebih suka mendapatkan informasi yang terpasang di <i>Web</i>.</p> <p>2. Investor lebih tertarik pada pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>3. Tuntutan penyajian informasi yang cepat dan akurat</p>

Komponen	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
<b>Data / Informasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kesadaran pentingnya data yang akurat dan terintegrasi</li> <li>Tersedianya H/W dan S/W pemroses data</li> <li>Tersedianya tenaga siap latih</li> <li>Memiliki data kependudukan yang akurat sebagai kunci integrasi dengan data lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum ada Basis Data terpadu</li> <li>Informasi/data antar aplikasi dan antar instansi belum terintegrasi</li> <li>Belum ada prosedur standar penanganan data</li> <li>Organisasi dan kelengkapan data masih belum baik (masih kesulitan dalam mencari informasi yang diperlukan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kemajuan Teknologi Informasi yang canggih dan berdayaguna</li> <li>H/W dan S/W pemroses data semakin lengkap dan canggih</li> <li>Banyak Pakar (penyedia jasa) di bidang pengolahan data (sistem informasi)</li> <li>Ada sistem Basis Data Terdistribusi ataupun terpusat yang terpadu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan masyarakat tentang informasi dan pelayanan</li> <li>Tuntutan masyarakat akan transparansi</li> <li>Data/Informasi yang salah bisa menjerumuskan</li> <li>Keamanan dan penyalahgunaan data</li> </ol>
<b>Organisasi, Sistem Manajemen dan Proses Kerja</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan puncak memiliki e-leadership yang baik</li> <li>Adanya kesadaran pentingnya komunikasi</li> <li>Adanya kesadaran pentingnya keterpaduan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya keinginan <i>sharing</i> sumber daya/data</li> <li>Ketersediaan dan kualitas peralatan antar bidang tidak merata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kemajuan Teknologi Informasi yang canggih dan berdayaguna</li> <li>Banyak pakar yang gigih mengembangkan e-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Data/Informasi yang tidak berkualitas akan menurunkan wibawa pemerintah</li> <li>Tuntutan kecepatan pelayanan untuk masyarakat</li> <li>Masyarakat semakin kritis</li> </ol>

Komponen	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	<p>4. Seluruh instansi terhubung lewat jaringan sehingga memudahkan komunikasi dan diseminasi informasi</p>	<p>3. SDM dalam bidang teknologi informasi antar instansi tidak merata dan kurang terorganisir</p> <p>4. Penyediaan dana untuk menangani <i>e-Government</i> belum terpadu</p>	<p><i>Government</i></p> <p>3. Banyak best practise <i>e-Government</i> yang dapat dirujuk</p> <p>4. Adanya Otonomi Daerah yang semakin mendekati pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>Aparatur langsung mendapatkan notifikasi melalui mobile</p>
<p><b>Pelayanan Masyarakat</b></p>	<p>1. Prosentase penggunaan komputer (<i>stand-alone</i> dan jaringan) dalam pelayanan masyarakat cukup</p> <p>2. Tingginya keinginan masyarakat umum dan bisnis untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan terpadu</p>	<p>1. Kurangnya sosialisasi keberadaan webiste pemerintah kota</p> <p>2. Waktu menanggapi kritik dan saran yang masih lama</p> <p>3. Pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa/kelurahan serta kecamatan masih rendah</p>	<p>1. Informasi layanan terpadu dapat ditingkatkan dengan layanan <i>e-Government</i></p>	<p>1. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, tepat dan terpadu</p>

Komponen	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	<p>3. Tersedianya website untuk menyampaikan kritik dan saran</p> <p>4. Adanya KIOS layar sentuh untuk informasi kota Denpasar dan perijinan</p>			<p>Aparatur langsung mendapatkan notifikasi melalui mobile</p>
<p><b>Peraturan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah ada Inpres no 3 th 2003</li> <li>2. Undang-undang ITE</li> <li>3. Surat Edaran Men PAN tentang software legal atau open source</li> </ol> 	<p>Belum ada petunjuk pelaksanaan</p>	<p>Otonomi daerah memungkinkan pembuatan peraturan pelaksanaan <i>e-Government</i> pada tingkat Pemerintah Kota</p> 	<p>Tuntutan kepastian hukum akan produk dari <i>e-Government</i></p>

## 1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar

Maka Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar terdiri dari :

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris**

1. Kasub Bag. Umum
2. Kasub Bag. Kepegawaian
3. Kasub Bag. Keuangan

**c. Kepala Bidang Bina Program**

1. Kasi Perencanaan
2. Kasi Data dan Informasi
3. Kasi Evaluasi dan Pelaporan

**d. Kepala Bidang Piranti Lunak**

1. Kasi Analisa dan Perancangan Piranti Lunak
2. Kasi Pengembangan dan Implementasi Piranti Lunak
3. Kasi Sosialisasi, Pelatihan dan Pemeliharaan Piranti Lunak

**e. Kepala Bidang Piranti Keras dan Jaringan**

1. Kasi Analisa dan Perencanaan Piranti Keras dan Jaringan
2. Kasi Pelaksanaan Piranti Keras dan Jaringan
3. Kasi Sosialisasi dan Pemeliharaan Piranti Keras dan Jaringan

**f. Kepala Bidang Pos dan Telematika**

2. Kasi Pos dan Komunikasi
3. Kasi Publikasi Media dan Telematika
4. Kasi Pengawasan dan Penyuluhan

**g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyiaran Publik Lokal**

1. Kasub Bag. Tata Usaha

**h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Publik**

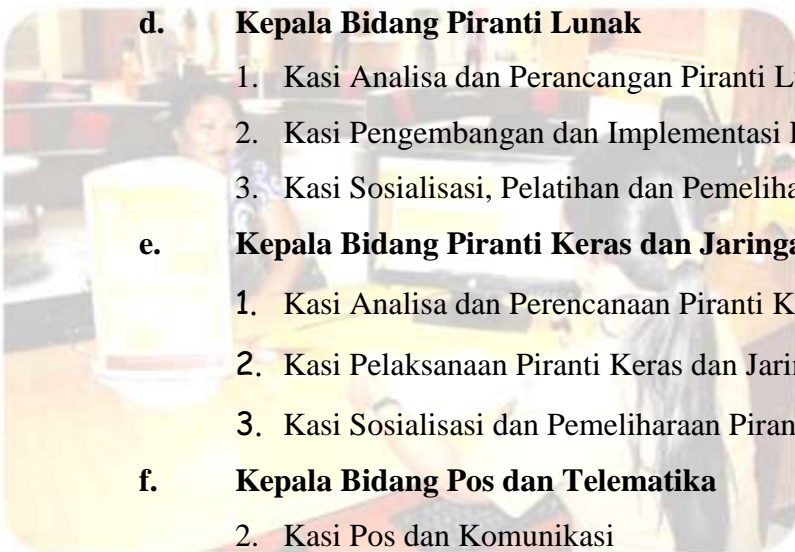
1. Kasub Bag. Tata Usaha

Melalui aplikasi ini  
Anda juga akan mendapatkan



Aparatur langsung  
mendapatkan  
notifikasi  
melalui mobile  
aplikasi

RESPON CEPAT APARATUR  
DENGAN IPRODUPASAR+



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal komunikasi dan informatika sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas daerah juga mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini bidang komunikasi dan informatika, pemberian rekomendasi bidang teknologi informasi dan komunikasi serta

pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya pada bidang komunikasi dan informatika.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar selama tahun 2015. Capaian Kinerja (*performance results*) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**BAB I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Isu Strategik, Struktur Organisasi dan sistematika LAKIP Tahun 2015.

**BAB II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar untuk periode 2011-2015 dan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2015.

**BAB III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi, Analisa dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





## BAB II PERENCANAAN KINERJA



Melalui *PRDENPASAR* selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (*Kekuatan dan Kelemahan*) serta Lingkungan Eksternal (*Peluang dan Tantangan*) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan *Visi, Misi, Tujuan, Sasaran* serta *Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran* dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### Visi Diskominfo

“Terwujudnya Kota Denpasar sebagai Kota Informasi melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang berbasis budaya unggulan dalam keseimbangan menuju keharmonisan”.

#### Misi Diskominfo

1. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika guna mencapai efisiensi dan efektifitas kerja.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika

#### Tujuan Diskominfo

Mengembangkan jaringan informasi secara terpadu serta terciptanya komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan teknologi informasi



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



## Sasaran Diskominfo

Berkembangnya jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat

Berkembangnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis e-Government

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

## Arah Kebijakan

1. Mengembangkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi
3. Mengembangkan aplikasi e-government

### 2.1.1 Program

Rencana Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai Implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan di atas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2010-2015, Rencana Program tersebut adalah

### 7 Program

1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
3. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
4. Kerjasama Informasi dengan Mass media
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

## 2.1.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran Terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran out put ) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan Utama yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu :

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
3. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Pengadaan alat studio dan komunikasi
5. Pengkajian dan pengembangan system informasi
6. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
7. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
8. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
9. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
10. Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (OUTCOME) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup OUTCOME yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kominfo sudah mendistribusikan tugas sampai tataran eselon IV yang dapat dilihat pada formulir cascading dan formulir Perjanjian Kinerja.



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 TARGET DAN ANALISIS TARGET RENSTRA 2011-2015

Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan di dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2011-2015 sebagaimana pada tabel 2 :

**Tabel 2**  
**Target Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar	Persentase	-	-	52,67		100
2.	Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar	Persentase	100	100	100	100	100
3.	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government /aplikasi pemerintah	Persentase	9	32	63	84	100
4.	Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun	Aplikasi	2	2	2	2	2
5.	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100
6.	Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	100	100	100	100	100
7.	Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK	orang	100	100	100	100	100

Jika target pada Renstra tahun 2015 ditafsirkan sebagai target 100% kinerja pada akhir tahun Renstra, maka kita dapat melihat peningkatan Target Renstra Per tahun.

Dari Tabel diatas dapat dilihat :

- 4 Indikator yang tidak memiliki kenaikan target dikarenakan memiliki target 100% dari tahun ke tahun (repetitif).

Beberapa Target yang memiliki target tetap 100% pada tahunnya adalah :

1. Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar;
2. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu;
3. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu
4. Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK

- 3 Indikator yang memiliki kenaikan target yang harus dipenuhi antara lain

1. Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar;
2. Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government /aplikasi pemerintah
3. Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun

### 3.2 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama



(IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama senantiasa direview seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Melalui "PRODENPASAR" selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan informasi seputar Denpasar.

**KINI HADIR PRODENPASAR+ DENGAN TAMBAHAN FITUR-FITUR BARUNYA**



Aparatur langsung mendapatkan notifikasi melalui mobile PRODENPASAR+.

**RESPON CEPAT APARATUR DENGAN PRODENPASAR+**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



KINI HADIR PRODENPASAR+  
DENGAN TAMBAHAN FITUR-FITUR BARUNYA

Tabel 3.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR  
PERIODE 2010- 2015**

- Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal komunikasi dan informatika sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini bidang komunikasi dan informatika  
- Pemberian rekomendasi bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan pelayanan umum, terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya pada bidang komunikasi dan informatika.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6
Berkembangnya jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat	Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar	<u>Jumlah SKPD yang mendapat pengembangan dan pembangunan infrastruktur Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar x 100%</u> Jumlah Target Pada Renstra	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Piranti Keras dan Jaringan	
	Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar	<u>Jumlah Pengaduan Kerusakan Jaringan x 100%</u> Jumlah Pengaduan yang sudah ditindaklanjuti	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Piranti Keras dan Jaringan	

Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Persentase penerapan e-government /aplikasi pemerintah di Kota Denpasar	<u>Jumlah penerapan e-government/aplikasi pemerintah x 100%</u> Jumlah Target Pada Renstra	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Piranti Lunak	
	Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun	Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Piranti Lunak	
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	<u>Jumlah laporan yang ditindaklanjuti tepat waktu X 100%</u> Jumlah laporan yang masuk	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Bina Program	
Meningkatannya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	<u>Jumlah kegiatan SPM X 100%</u> Target SPM berdasar Permen kominfo 22 2010	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Pos dan Telekomunikasi	
	Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK	Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Bina Program	

Tabel 4.

**PENJABARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR  
TAHUN 2011-2015**

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Realisasi	REALISASI				
			2011-2015	2011-2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Berkembangnya jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat	1 Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar	100% (19 SKPD)	100% (19 SKPD)	-	-	52,63% (10 SKPD)	-	100% (19 SKPD)
		2 Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
2.	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	1 Prosentase penerapan government /aplikasi pemerintah di Kota Denpasar	100% (57 Aplikasi)	100% (57 Aplikasi)	9% (5 Aplikasi)	32% (18 aplikasi)	63,15% (36 Aplikasi)	84,21% (48 Aplikasi)	100% (57 Aplikasi)
		2 Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun	10 Aplikasi	15 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	5 Aplikasi	2 Aplikasi	6 Aplikasi

Melalui **PRODENPASAR+** selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar

3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu					100% (64)	100% (595)	100% (870)
4.	Meningkatannya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK	500 orang	1383 orang	100 orang	200 orang	623 orang	160 orang	300 orang



### 3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Pada Bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi. Penghitungan capaian Kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta menunjukkan validitas data kinerja yang hitung dalam capaian kinerja.

#### 1. Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar

##### a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator

Internet telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perorangan, organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintah. Di dalam bidang pemerintahan, internet digunakan pemerintah untuk membuat sistem informasi yang bermanfaat mempermudah tugas-tugas pemerintah. Perangkat – perangkatnya pun sebagai pendukung kelancaran proses informasi dan komunikasi misalkan saja jaringan. Kendala yang sering muncul akibat jaringan adalah Keadaan Cuaca yang bisa mengakibatkan perubahan sinyal/frekuensi jaringan wireless, Throughput (Kecepatan Akses) untuk fo lebih besar, Bebas Independence.

##### b. Instrumen / cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan komunikasi di Kota Denpasar. Adapun target jumlah pengembangan FO yang telah ditetapkan di dalam Renstra Diskominfo 2011 - 2015 adalah sebanyak 19 SKPD. Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator 1} = \frac{\text{Jumlah SKPD yang mendapat pengembangan dan pembangunan infrastruktur Jaringan FO di Kota Denpasar} \times 100\%}{\text{Jumlah Target Pada Renstra (19 SKPD)}}$$

##### c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja

Sampai dengan masa berakhirnya kinerja, SKPD yang sudah terpasang Jaringan FO (Fiber Optik) telah sesuai dengan target yang di rencanakan. SKPD tersebut antara lain :

1. Walikota
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
3. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar
4. Badan Kesbangpol dan Linmas
5. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar
7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar
8. DPRD Kota Denpasar
9. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

**KINI HADIR PRODENPASAR+  
DENGAN TAMBAHAN FITUR-FITUR BARUNYA**

Melalui PRODENPASAR+ selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan

d. Kerja Nyata v.s. Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2013, target kinerja indikator "Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar" adalah sebesar 52,63 %. Target tersebut telah dicapai dengan capaian kinerja 52,63%. dibandingkan dengan capaian 2015 yang sebesar 100%, Jadi terjadi penambahan kinerja di tahun 2015 sebesar 47,36% dengan penambahan 9 SKPD yang menggunakan Jaringan FO (Fiber Optik).

e. Output program / kegiatan / anggaran

Output dari indikator " Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar" adalah SKPD yang SKPD yang mendapat pengembangan dan pembangunan infrastruktur Jaringan FO di Kota Denpasar . Capaian kinerja pada indikator " Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar" telah berhasil mencapai target yang di harapkan di Tahun 2015.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan di **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**. Kegiatan yang terkait indikator " Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar" adalah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi berupa pembangunan infrastruktur jaringan Fiber Optik di Kota Denpasar Tahap 2. Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan input sesudah penetapan kinerja sebesar Rp. 509.762.000, terealisasi Rp. 421.958.000 (82,78%), menghasilkan kelancaran dalam memberikan pelayanan.

Indikator kinerja "Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar" *cukup efektif* dalam mencapai hasil kinerja sesuai target kinerja, serta *dapat melakukan efisiensi* dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Realisasi Kinerja sampai dengan masa berakhirnya RENSTRA 2011-2015.

Untuk melihat Realisasi Kinerja Tahunannya dapat dilihat pada Tabel 4 diatas. Dapat disimpulkan untuk Indikator "Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar" Pencapaian Kinerja nya telah mencapai 100% dengan Realisasi sebagai berikut:

Target 2011-2015	Realisasi 2011-2015
100% (19 SKPD)	100% (19 SKPD)

SKPD yang mendapat pengembangan dan pembangunan infrastruktur Jaringan FO di Kota Denpasar antara lain :

1. DPRD Kota Denpasar
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
3. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar
4. Badan Pelayanan Perijinan terpadu satu pintu dan Penanaman Modal
5. Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar
6. Badan Kesbangpol dan Linmas
7. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
8. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
12. Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota Denpasar
13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar
14. Dinas Pariwisata Kota Denpasar
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
16. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar
18. Walikota
19. Camat Denpasar Utara



## 2. Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar

### a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator

Internet telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi instansi pemerintah. Kendala yang sering muncul adalah Pengaduan adanya kerusakan jaringan internet. Untuk itu diperlukan tindak lanjut pengaduan tentang jaringan yang dilakukan Dinas Kominfo.

### b. Instrumen / cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat khususnya di Kota Denpasar.

$$\text{Capaian indikator 2 : } \frac{\text{Jumlah Pengaduan kerusakan Jaringan}}{\text{Jumlah Pengaduan yang sudah ditindak lanjuti}} \times 100\%$$

### c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja

Sampai dengan masa berakhirnya Kinerja 2015, Jumlah Pengaduan kerusakan Jaringan yang sudah ditindaklanjuti sebesar 223 pengaduan

### d. Kerja Nyata v.s. Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2014, target kinerja indikator " Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar " adalah sebesar 100 %. Target tersebut telah dicapai dengan capaian kinerja 100%. dibandingkan dengan capaian 2015 sebesar 100%.

### e. Output program / kegiatan

Output dari indikator " Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar " adalah SKPD yang sudah ditindaklanjuti pengaduan kerusakan jaringan di Kota Denpasar . Capaian kinerja pada indikator " Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar " telah berhasil mencapai target yang di harapkan di Tahun 2015.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan di **Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur** Kegiatan yang terkait indikator " Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya

dengan baik di Kota Denpasar " adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

f. Realisasi Kinerja sampai dengan masa berakhirnya RENSTRA 2011-2015.

Untuk melihat Realisasi Kinerja Tahunannya dapat di lihat pada Tabel 4 diatas. Dapat di simpulkan untuk Indikator " Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar " Pencapaian Kinerja nya telah mencapai 100% dengan Realisasi sebagai berikut:

Target 2011-2015	Realisasi 2011-2015
400 Pengaduan	400 Pengaduan yang ditindaklanjuti

3. Persentase penerapan e-government/Aplikasi pemerintah di Kota Denpasar

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator

e-government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Penerapan E-government / Aplikasi pemerintah sebagai pendukung kinerja pemerintah dan pelayanan masyarakat untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Kondisi saat ini dimungkinkan setiap SKPD untuk membangun aplikasi secara mandiri.

b. Instrumen / cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui penerapan e- government/ Aplikasi pemerintah di Kota Denpasar. Adapun Target Jumlah Aplikasi yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfo 2011-2015 adalah sebanyak 57 Aplikasi. Adapun Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator 3: } \frac{\text{Jumlah Aplikasi e- government}}{\text{Jumlah Target pada Renstra (57 Aplikasi)}} \times 100\%$$



### c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja

Sampai dengan akhir tahun 2015, Aplikasi yang dibangun SKPD sebanyak 9 Aplikasi / telah sesuai dengan target yang di rencanakan. Aplikasi tersebut antara lain:

Tabel 5.  
Aplikasi 2015

NO	APLIKASI	SKPD
1.	Sistem Informasi Graha Sewaka Dharma (Dashboard Internal Denpasar)	Dinas Kominfo
2.	Aplikasi Game Puzzle Pendukung Museum Visual	BPAD
3.	Aplikasi Pendataan dan Pemanfaatan Dokumen Lingkungan Hidup	BLH
4.	Sistem Pelayanan Terpadu (Simyandu)	Dinas Kominfo
5.	Sistem Pelacak Dokumen dan Kinerja (e-Lacak)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.	Sistem Pengelolaan Barang Habis Pakai	Dinas Kominfo
7.	Pembangunan Data Centre dan Sistem Pengolahan Data Terpadu	Dinas Kominfo
8.	Pengembangan Aplikasi M-City	Dinas Kominfo
9.	Pengembangan Website Beraksara Bali	Dinas Kominfo

### d. Kerja Nyata v.s. Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2014, target kinerja indikator " Persentase penerapan e-government/Aplikasi pemerintah di Kota Denpasar" adalah sebesar 84,21%. Target tersebut telah dicapai dengan capaian kinerja 84,21%. dibandingkan dengan capaian 2015 yang sebesar 100% dengan capai kinerja 100%.Terjadi penambahan kinerja di tahun 2015 sebesar 15,79% dengan penambahan 9 Aplikasi.

### e. Output program / kegiatan / anggaran

Output dari indikator " Persentase penerapan e-government/Aplikasi pemerintah di Kota Denpasar" adalah Aplikasi yang dibangun /di kembangkan Kembangkan di Kota Denpasar . Capaian kinerja pada indikator " Persentase penerapan e-government/Aplikasi pemerintah di Kota Denpasar" telah berhasil mencapai target yang di diharapkan di Tahun 2015.



f. Realisasi Kinerja sampai dengan masa berakhirnya RENSTRA 2011-2015.

Untuk melihat Realisasi Kinerja Pertahunnya dapat di lihat pada Tabel 4 diatas. Dapat di simpulkan untuk Indikator " Persentase penerapan e-government/Aplikasi pemerintah di Kota Denpasar" Pencapaian Kinerja nya telah mencapai 100% dengan Realisasi sebagai berikut:

Target 2011-2015	Realisasi 2011-2015
100% (57 Aplikasi)	100% (57 Aplikasi)

Aplikasi- Aplikasi yang ada di Kota Denpasar antara lain :

Tabel 6.  
Aplikasi 2011-2015

No	Aplikasi	SKPD
1.	Akta Online	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Konsolidasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	KTP Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Sistem Informasi Arsip Digital Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.	Sistem Pendataan Penduduk Pendaftar	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
7.	Aplikasi Museum Visual (Diorama)	Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar
8.	Aplikasi Museum Visual (Diorama) Tahap II	Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar
9.	Aplikasi Perpustakaan	Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar
10.	Data Statistik Pertanian Kota Denpasar	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
11.	Sistem Informasi Kearsipan (Smart Arsip)	Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
12.	Kebudayaan berbasis Geografis Information System (GIS)	Dinas Kebudayaan
13.	Aplikasi Surat Keluar - Masuk	Dinas Kebudayaan
14.	Sistem Informasi Kerjasama	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar

15.	Sistem Informasi Geografis Ruas Jalan Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum
16.	SMS Gateway	BPPTSP & PM
17.	E-Pooling IKM	BPPTSP & PM
18.	Sistem Pelayanan Perijinan Keliling	BPPTSP & PM
19.	E-Office	BPPTSP & PM
20.	Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perijinan	BPPTSP & PM
21.	LPPD On Line	Bagian Pemerintahan Setda Kota Denpasar
22.	Sistem Informasi PBB	Dinas Pendapatan
23.	Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPADA)	Dinas Pendapatan
24.	Sistem Informasi SSPD BPHTB	Dinas Pendapatan
25.	SIMPEG	BKPP
26.	e-Monev (TEPPA)	Bagian Program Pembangunan Setda Kota Denpasar
27.	SIG Lokasi Rawan Kecelakaan	Dinas Perhubungan
28.	SIG Sistem Informasi Perhubungan	Dinas Perhubungan
29.	Sistem PKB Online	Dinas Perhubungan
30.	Live Streaming ATCS	Dinas Perhubungan
31.	PPDB Real Time Online (RTO)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
32.	Pendataan PAUDNI	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
33.	Dapodik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
34.	Pengembangan Website Portal	Dinas Komunikasi dan Informatika
35.	Pengaduan Rakyat Online Kota Denpasar (PRODENPASAR)	Dinas Komunikasi dan Informatika
36.	Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Dinas Komunikasi dan Informatika
37.	Bank Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
38.	Jendela Kota Denpasar (Pusat Data berbasis GIS)	Dinas Komunikasi dan Informatika

39.	Sistem Perencanaan Pemaketan Anggaran (SPPA)	Dinas Komunikasi dan Informatika
40.	Sistem Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Dinas Komunikasi dan Informatika
41.	Sistem Monitoring dan Evaluasi (SME)	Dinas Komunikasi dan Informatika
42.	Sistem Publikasi Peraturan Perundang-undangan (Produk Hukum)	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar
43.	Sistem Database Organisasi Massa (ORMAS)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar
44.	Sistem Koperasi berbasis GIS	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar
45.	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPEPEDA)	BAPPEDA Kota Denpasar
46.	SIPKD (sistem Pengelolaan Keuangan Daerah)	Keuangan
47.	Sistem Koneksitas Sertifikasi Tanah melalui Geographic Information System (GIS)	DTRP Kota Denpasar
48.	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIMAK) - Layanan surat-menyurat Desa/Kelurahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
49.	Sistem Informasi Graha Sewaka Dharma (Dashboard Internal Denpasar)	Dinas Komunikasi dan Informatika
50.	Aplikasi Game Puzzle Pendukung Museum Visual	BPAD
51.	Aplikasi Pendataan dan Pemanfaatan Dokumen Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
52.	Sistem Pelayanan Terpadu (Simyandu)	Dinas Komunikasi dan Informatika
53.	Sistem Pelacakan Dokumen dan Kinerja (e-Lacak)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
54.	Sistem Pengelolaan Barang Habis Pakai	Dinas Komunikasi dan Informatika
55.	Pembangunan Data Center dan Sistem Pengolahan Data Terpadu	Dinas Komunikasi dan Informatika
56.	Pengembangan Aplikasi M-City	Dinas Komunikasi dan Informatika
57.	Pengembangan Sistem Website Beraksara Bali	Dinas Komunikasi dan Informatika

#### 4. Jumlah Sistem Informasi/ Aplikasi yang terlaksana dalam satu Tahun

##### a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar tidak henti-hentinya membuat terobosan di dalam penerapan e-government/aplikasi, di dalam meningkatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kondisi saat ini Sistem / Aplikasi yang dibangun oleh masing - masing SKPD. Aplikasi yang dibangun oleh Dinas Kominfo

##### b. Instrumen / cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui terobosan di dalam penerapan aplikasi. Adapun Target Jumlah Aplikasi yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfo 2011-2015 adalah sebanyak 10 Aplikasi. Adapun perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun

##### c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja

Di tahun 2015, Aplikasi yang dibangun Dinas Kominfo sebanyak 6 Aplikasi melebihi target yang di rencanakan. Aplikasi tersebut antara lain:

NO	APLIKASI	SKPD
1.	Sistem Informasi Graha Sewaka Dharma (Dashboard Internal Denpasar)	Dinas Kominfo
2.	Sistem Pelayanan Terpadu (Simyandu)	Dinas Kominfo
3.	Sistem Pengelolaan Barang Habis Pakai	Dinas Kominfo
4.	Pembangunan Data Centre dan Sistem Pengolahan Data Terpadu	Dinas Kominfo
5.	Pengembangan Aplikasi M-City	Dinas Kominfo
6.	Pengembangan Website Beraksara Bali	Dinas Kominfo

##### d. Kerja Nyata v.s. Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2014, target kinerja indikator " Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun " adalah sebesar 2 Aplikasi.

Target tersebut telah dicapai dengan capaian kinerja 2 Aplikasi. Dibandingkan dengan capaian 2015 yang sebesar 6 Aplikasi. Terjadi penambahan kinerja di tahun 2015 sebesar 4 Aplikasi dari target yang direncanakan .

e. Output program / kegiatan / anggaran

Output dari indikator " Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun " adalah Aplikasi yang dibangun /di kembangkan oleh Dinas Kominfo. Capaian kinerja pada indikator " Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun " telah berhasil melebihi target yang di harapkan Hal tersebut berarti Dinas Kominfo terus melakukan inovasi.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Untuk pembuatan Aplikasi Tahun Anggaran 2015 khusus untuk Aplikasi di Dinas Kominfo dilaksanakan di **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**. Kegiatan yang terkait indikator " Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun " adalah Pembangunan Data Center dan Sistem Pengolahan Data Terpadu pada pemerintah Kota Denpasar, Pengembangan sistem portal pelayanan publik pada Pemerintah Kota Denpasar, Pengembangan Sistem Berbasis Budaya berupa Website Beraksaran Bali Kota Denpasar, Pengembangan Aplikasi M-City . Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan input sesudah penetapan kinerja sebesar Rp. 663.201.000, terealisasi Rp. 568.436.500 (85,71%), menghasilkan 6 Aplikasi.

Indikator kinerja " Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun " *cukup efektif* dalam mencapai hasil kinerja sesuai target kinerja, serta *dapat melakukan efisiensi* dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Realisasi Kinerja sampai dengan masa berakhirnya RENSTRA 2011-2015.

Untuk melihat Realisasi Kinerja Pertahunnya dapat di lihat pada Tabel 4 diatas. Dapat di simpulkan untuk Indikator " Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun " Pencapaian Kinerja nya telah mencapai 100% dengan Realisasi sebagai berikut:

Target 2011-2015	Realisasi 2011-2015
100% (10 Aplikasi)	150% (15 Aplikasi)



Tabel 7  
Aplikasi Kominfo 2011-2015

Aplikasi- Aplikasi yang di Bangun Dinas Kominfo antara lain :

No	Aplikasi	SKPD
1.	Bank Data	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
2.	Pengembangan Website Portal	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
3.	Pengaduan Rakyat Online Kota Denpasar (PRODENPASAR)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
4.	Jendela Kota Denpasar (Pusat Data berbasis GIS)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
5.	Sistem Perencanaan Pemaketan Anggaran (SPPA)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
6.	Sistem Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
7.	Sistem Monitoring dan Evaluasi (SME)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
8.	Sistem Perencanaan Pemaketan Anggaran (SPPA)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
9.	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIMAK) - Layanan surat-menyurat Desa/Kelurahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
10.	Sistem Informasi Graha Sewaka Dharma (Dashboard Internal Denpasar)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
11.	Sistem Pelayanan Terpadu (Simyandu)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
12.	Sistem Pengelolaan Barang Habis Pakai	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
13.	Pembangunan Data Centre dan Sistem Pengolahan Data Terpadu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
14.	Pengembangan Aplikasi M-City	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
15.	Pengembangan Website Beraksara Bali	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar



5. Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator

Layanan Pengaduan Masyarakat ditangani secara khusus oleh Operator Pro Denpasar dengan menggunakan Aplikasi Pengaduan Rakyat Online Kota Denpasar (PRO DENPASAR). Pro Denpasar menerima pengaduan melalui beberapa media seperti



b. Instrumen / cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui partisipasi publik dalam pembangunan daerah antara masyarakat umum dengan Pemerintah Kota Denpasar. Adapun Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator 5} : \frac{\text{Jumlah laporan yang ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan yang masuk}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja

Jumlah laporan yang diterima oleh operator pengaduan dari Bulan Januari - Desember 2015 sebagai berikut :



Dari Grafik diatas Dapat dilihat :

Berdasarkan Jenis Pengaduan

Layanan Publik : 262 Laporan

Lingkungan : 158 Laporan

Infrastruktur : 206 Laporan

Lalu Lintas : 99 Laporan

Sosial & Tenaga Kerja : 72 Laporan

Lain-Lain : 73 Laporan

**KINI HADIR PRODENPASAR+  
DENGAN TAMBAHAN FITUR-FITUR BARUNYA**

Melalui PRODENPASAR+ selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar



Total Pengaduan Tahun 2015 : 870 Laporan, dan seluruh laporan telah ditindaklanjuti tepat waktu. Capaian indikator "Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu" adalah :  $870/870=100\%$  (sesuai dengan target )

d. Kerja Nyata v.s. Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2014, target kinerja indikator "Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu " adalah 100% dengan capaian kinerja 100% dan di Tahun 2015 capaian kinerja 100%. Hal tersebut menunjukkan konsistensi kinerja.

e. Output program / kegiatan / anggaran

Output dari indikator "Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu " adalah alat bantu untuk melakukan monitoring dan verifikasi capaian program pembangunan maupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan di Kota Denpasar. Capaian kinerja pada indikator "Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu " telah berhasil mencapai target yang di harapkan di Tahun 2015. Tidak ada anggaran untuk kegiatan dengan indikator "Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu "

f. Realisasi Kinerja sampai dengan masa berakhirnya RENSTRA 2011-2015.

Untuk melihat Realisasi Kinerja Pertahunnya dapat di lihat pada Tabel 4 diatas. Dapat di simpulkan untuk Indikator "Persentase layanan pengaduan

masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu " Pencapaian Kinerja nya mencapai 100% dengan Realisasi sebagai berikut:

Target 2011-2015	Realisasi 2011-2015
100%	100%

## 7. Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika

### a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Informasi dan Komunikasi Di Kabupaten / Kota berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :22/PER/M.KOMINFO/12/2010. tugas pokok yaitu pelayanan desiminasi informasi dengan menggunakan indikator yaitu: Media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal serta media luar ruang

### b. Instrumen / cara perhitungan indikator

Adapun Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut

$$\text{Capaian indikator 5} = \frac{\text{Jumlah kegiatan SPM}}{\text{Target SPM berdasar Permen kominfo 22 2010}} \times 100\%$$

### c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja

Target dan capaian kinerja SPM dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 8

## Target SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	'Nilai	Target	Realisasi	%
				2015	2015	Capain
		<b>Indikator-1:</b>				
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:			Aparatur langsung mendapatkan notifikasi melalui mobile	
	a. Media massa:	12 kali per tahun				
	- Media Cetak			11	11	100%
	- Radio			Setiap hari	Setiap hari	100%
	- Televisi			74	74	100%
	b. Media website (media online)	Setiap hari		Setiap hari	Setiap hari	100%
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 kali per tahun		4	4	100%
	d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	12 kali per tahun setiap kecamatan				
	e. Media luar ruang:	12 kali per tahun				
	- Buletin			0	0	
	- Leaflet			0	0	
	- Booklet			325	325	100%
	- Brosur			2600	2600	100%
	- Spanduk			28	28	100%
	- Baliho			26	26	100%
		<b>Indikator-2:</b>				
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan				

Capaian kinerja untuk indikator " Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika " adalah 100% sesuai dengan Target 2015.

d. Kerja Nyata v.s. Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2014, target dan capaian kinerja indikator " Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika " adalah 100% sama di tahun 2015 sesuai target yang diharapkan.

e. Output program

Output dari indikator " Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika " adalah Aplikasi yang dibangun /di kembangkan Kembangkan oleh Dinas Kominfo Pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Komunikasi dan Informasi. Capaian kinerja pada indikator " Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika " telah berhasil mencapai target yang di harapkan di Tahun 2015.

Indikator kinerja " Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun " **cukup efektif** dalam mencapai hasil kinerja sesuai target kinerja,

f. Realisasi Kinerja sampai dengan masa berakhirnya RENSTRA 2011-2015.

Untuk melihat Realisasi Kinerja Tahunannya dapat di lihat pada Tabel 4 diatas. Dapat di simpulkan untuk Indikator " Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika " Pencapaian Kinerja nya telah mencapai 100% dengan Realisasi sebagai berikut:

Target 2011-2015	Realisasi 2011-2015
100%	100%



## 8. Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK

### a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator

SDM Berperan langsung dalam pembangunan sebuah bangsa di kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. karena dengan SDM yang tangguh, sebuah negara pun dapat maju, bahkan dapat melampaui Negara-negara yang kaya akan SDA. Oleh karena itulah dikatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu Negara ditentukan oleh tingginya kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Kendala saat ini adalah Kurangnya pemahaman di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### b. Instrumen / cara perhitungan indikator

Adapun perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK.

### c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja

Di tahun 2015 Pelatihan yang dilaksanakan yaitu Seminar dalam bidang animasi dengan capaian kinerja 300% sesuai yang diharapkan. dengan tingkat kehadiran dan pemahaman tentang animasi. dimana peserta nya terdiri dari SMA/SMK dan Perguruan Tinggi di Kota Denpasar.

### d. Kerja Nyata v.s. Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2014, target kinerja indikator "Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK " adalah 100% dengan capaian kinerja 160% dan di Tahun 2015 capaian kinerja 300%. Terjadinya peningkatan capaian kinerja sebesar 140%.

### e. Output program / kegiatan / anggaran

Output dari indikator " Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK" adalah Terselenggaranya seminar dalam bidang animasi. Capaian kinerja pada indikator " Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK" telah berhasil mencapai target yang di harapkan di Tahun 2015.



Dalam mencapai sasaran program tersebut, dilaksanakan di **Program Fasilitasi Peningkatan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi.**

Kegiatan yang terkait indikator " Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK" adalah Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi berupa seminar animasi untuk pelajar di Kota Denpasar . Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan input sesudah penetapan kinerja sebesar Rp. 187.260.000, terealisasi Rp. 154.788.100 (82,66%), menghasilkan 300 Pelajar yang memahami TIK Bidang Animasi.

Indikator kinerja " Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun " *cukup efektif* dalam mencapai hasil kinerja sesuai target kinerja, serta *dapat melakukan efisiensi* dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Realisasi Kinerja sampai dengan masa berakhirnya RENSTRA 2011-2015.

Untuk melihat Realisasi Kinerja Tahunannya dapat di lihat pada Tabel 4 diatas. Dapat di simpulkan untuk Indikator "Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK" capaian kinerjanya mengalami peningkatan yang signifikan.

Target 2011-2015	Realisasi 2011-2015
500 orang (100%)	1383 orang (276,60%)

Adapun Bimtek yang telah dilaksanakan dari Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi tentang pemanfaatan perangkat lunak legal dan open source
2. Bimbingan teknis mikrotik dan jaringan bagi tenaga ICT Dinas Kominfo Kota Denpasar
3. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi berupa Bimtek Implementasi E-Project Planning on line di Kota Denpasar
4. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi berupa Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kota Denpasar



5. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi berupa Bimtek Implementasi SSPK (Sistem Surat Perjanjian On Line di Kota Denpasar)
6. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi berupa Bimtek Implementasi SME (Sistem Monitoring dan Evaluasi) On Line di Kota Denpasar
7. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi berupa Bimtek Pemeliharaan Jaringan Internet SKPD di Kota Denpasar
8. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi untuk Pranata Komputer e-government
9. Bimtek Pengembangan Subdomain pada SKPD, Kecamatan, Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
10. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi berupa Seminar Animasi untuk pelajar di Kota Denpasar

**Dokumentasi Bimtek dari 2014 - 2015**

Bimtek Pranata Komputer E-Government



Bimtek Pengembangan Subdomain





# Bimtek Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Melalui **PRODENPASAR** selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar



KINI HADIR DENGAN TAMBAHAN



## SEMINAR ANIMASI 2015



Aparatur langsung mendapatkan notifikasi melalui mobile PRODENPASAR



# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



### 3.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar diwujudkan melalui 7 program dan 23 kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 4.248.920.100 dengan realisasi Rp. 4.099.770.048 atau (96.49) persen. Belanja langsung di alokasikan Rp. 12.253.384.000 dengan realisasi Rp. 10.422.236.933 atau (85.06) persen

#### Target :

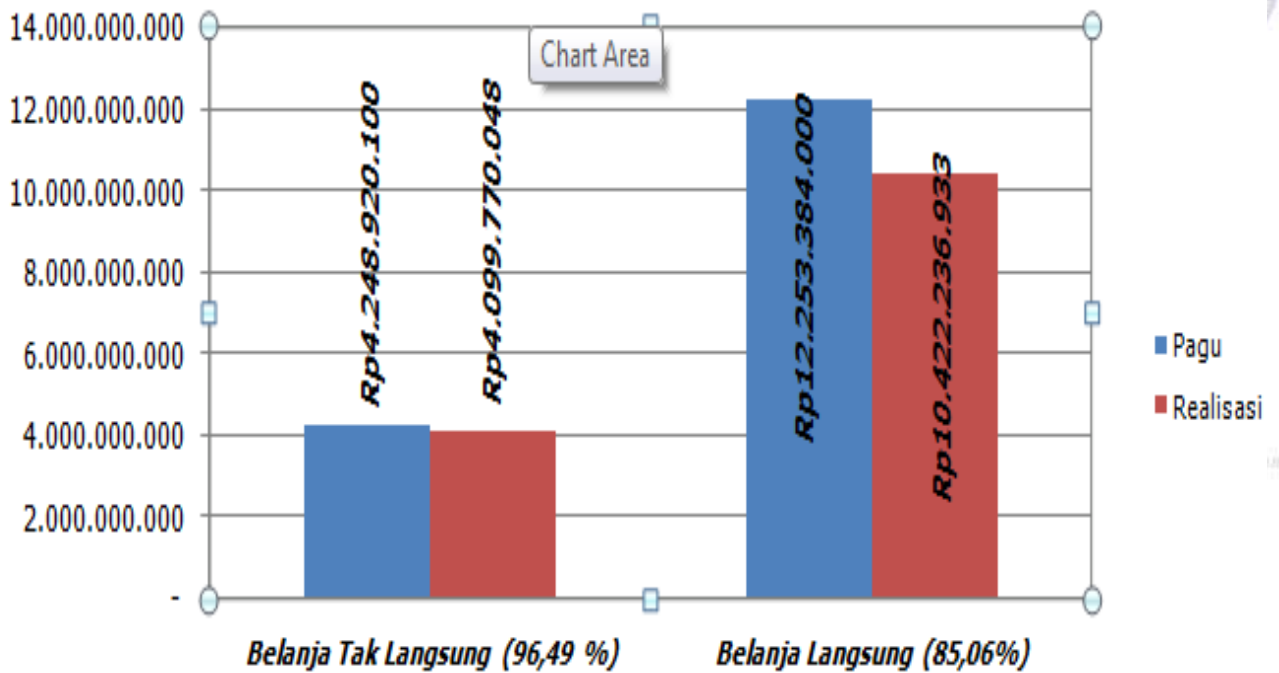
- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Belanja tidak langsung                  | Rp. 4.248.920.100 |
| a. | Belanja Pegawai                         | Rp. 4.248.920.100 |
| 2. | Belanja langsung                        | Rp.12.253.384.000 |
| a. | Belanja Pegawai                         | Rp. 22.200.000    |
| b. | Belanja barang dan jasa                 | Rp.11.170.080.000 |
| c. | Belanja Modal                           | Rp. 1.061.104.000 |
| 3. | Total Belanja Langsung dan Tak langsung | Rp.16.502.304.100 |

#### Realisasi :

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Belanja tidak langsung                  | Rp. 4.099.770.048 |
| a. | Belanja Pegawai                         | Rp. 4.099.770.048 |
| 2. | Belanja langsung                        | Rp.10.422.236.933 |
| a. | Belanja Pegawai                         | Rp. 21.800.000    |
| b. | Belanja barang dan jasa                 | Rp. 9.473.351.933 |
| c. | Belanja Modal                           | Rp. 927.085.000   |
| 3. | Total Belanja Langsung dan Tak langsung | Rp.14.522.006.981 |

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut fisik serta keuangan dapat di lihat dalam tabel berikut :

Dengan Grafik



Tabel 9

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar.

No	Program / Kegiatan	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
1	<b>Belanja</b> <b>Belanja Tidak Langsung</b> Belanja Pegawai	45 PNS	4.248.920.100	45 PNS	100	4.099.770.048	96.49
1	<b>Belanja Langsung</b> <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> - Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 laporan	2.383.029.600	1 laporan	100	2.026.528.729	85.04
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 laporan	1.126.000.000	1 laporan	100	679.147.204	60.32

3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6 orang	40.800.000	4 orang	100	16.256.300	39.84
4	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>						
	- Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Publik Dinas Kominfo	1 laporan	3.473.814.900	1 laporan	100	3.070.101.427	88.38
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui radio publik Kota Denpasar	Informasi untuk masyarakat (8 mata acara per hari + 2 Acara Khusus)	965.667.000	Informasi untuk masyarakat (8 mata acara per hari + 2 Acara Khusus)	100	813.788.075	84.27
	- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Provinsi Bali.	1 kali (1 stand pameran)	113.266.000	1 kali (1 stand pameran)	100	100.308.500	88.56
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa pengelolaan website, subdomain, perencanaan dan evaluasi pelaporan pada Dinas Kominfo Kota Denpasar	1 materi berita website, 1 materi video berita di website, 1 materi pembaharuan data di bank data, 2 Laporan tahunan dinas	177.347.500	1 materi berita website, 1 materi video berita di website, 1 materi pembaharuan data di bank data, 2 Laporan tahunan dinas	100	160.181.800	90.32
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Kota Denpasar	1 kali (1 stand pameran)	589.000.000	1 kali (1 stand pameran)	100	558.234.692	94.78
	- Pembangunan Data Center dan Sistem Pengolahan Data Terpadu pada Pemerintah Kota Denpasar	1 kali (kajian data centre) dan 1 Sistem / aplikasi Data Centre	199.300.000	1 kali (kajian data centre) dan 1 Sistem/ aplikasi Data Centre	100	189.035.500	94.85
	- Pengembangan Sistem E - Gov	4 Pengembangan Sistem Informasidan 3 Pemeliharaan Sistem Informasi	271.007.000	4 Pengembangan Sistem Informasidan 3 Pemeliharaan Sistem Informasi	100	261.131.000	96.36
	- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi berupa pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik di Kota Denpasar Tahap 2	7 SKPD	509.762.000	7 SKPD	100	421.958.000	82.78
	- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Berupa Penyelenggaraan Promosi Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi	'+ 10.000 pengunjung	608.300.000	'+ 10.000 pengunjung	100	565.518.606	92.97
	- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi berupa pembangunan control data centre room Tahap I	1 Pusat Control Data Centre	123.000.000	1 Pusat Control Data Centre	100	122.850.000	99.88

	- Pengembangan Sistem Portal Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Denpasar	4 Sistem Informasi	165.611.000	4 Sistem Informasi	100	158.561.000	95.74
	- Pengembangan Sistem Berbasis Budaya berupa Website Beraksara Bali Kota Denpasar	1 Website Beraksara Bali	198.361.000	1 Website Beraksara Bali	100	150.036.000	75.64
	- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui video transformasi Kota Denpasar	1 Video Transformasi	121.284.000	1 Video Transformasi	100	116.296.500	95.89
	- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Berupa Inovasi Kinerja Pemerintah Daerah	300Buku Inovasi	136.508.000	300Buku Inovasi	100	133.636.000	97.90
	- Pengembangan M-City	1 Aplikasi	99.929.000	1 Aplikasi	100	70.804.000	70.85
	- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Berupa desiminasi informasi melalui Promosi dan Publikasi Pelayanan Publik	10 buah spanduk, 15 umbul-umbul, 10 tayang televisi, 15 hari iklan media internet, 30 tayang radio, 2 kali media massa, 7 baliho	116.012.000	10 buah spanduk, 15 umbul-umbul, 10 tayang televisi, 15 hari iklan media internet, 30 tayang radio, 2 kali media massa, 7 baliho	100	115.512.000	99.57
<b>5</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>						
	- Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Berupa Seminar Animasi untuk Pelajar di Kota Denpasar	300 orang	187.260.000	300 orang	100	154.788.100	82.66
<b>6</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>						
	- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Masa	3 Video, 4pentas pertunjukan rakyat, 64tayang televisi, 3kali media cetak	325.276.000	3 Video, 4pentas pertunjukan rakyat, 64tayang televisi, 3kali media cetak	100	261.276.000	80.32
<b>7</b>	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>						
	- Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terpadu Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020Berwawasan Budaya	1 Laporan	211.268.000	1 Laporan	100	173.451.000	82.10
	- Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi berupa penyusunan kajian teknis terkait pemanfaatan dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Denpasar	1 Laporan	111.581.000	1 Laporan	100	102.836.500	92.16

Persentase Anggaran Keuangan Yang terealisasi untuk belanja tidak langsung 96,49% dan untuk belanja tidak langsung hanya mencapai 85.06% Hal ini karena terjadinya efisiensi anggaran.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENPASAR

## HASIL KINERJA

Berdasarkan Program - Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar di Tahun 2015 diperoleh Hasil Kinerja yang digunakan sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK .

Melalui *PRODENPASAR* selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar

### Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK diantaranya :

Website Kota Denpasar [www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id) & Subdomain

Diskominfo mengelola website Resmi Pemkot Denpasar  
Website Instansi (Subdomain)



[www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id)

Info Event, Breaking News, Layanan Perijinan,  
Layanan Publik, Transparansi Keuangan

60

Website Instansi  
(Subdomain)

Terdiri dari Sekretariat, Badan, Dinas,  
Kantor, Perusahaan Daerah,  
Kecamatan dan Desa/Kelurahan

# MEDIA INFORMASI

Beberapa Media Informasi Yang di kelola Oleh Diskominfo

Melalui *PRODENPASAR* selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar



## GRMS Kota Denpasar



### Bagian GRMS

1. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)
2. SPPA (Sistem Perencanaan Pemaketan Anggaran)
3. e-Lelang
4. SSPK (Sistem Surat Perjanjian Kerja)
5. SME (Sistem Monitoring dan Evaluasi)
6. SPKJ (Sistem Penilaian Kinerja)



Up date Data Standar Harga pada Custom SIPKD



PRO Denpasar



## LAYANAN PENGADUAN



Beberapa media pengaduan yang terintegrasi dengan PRODENPASAR



PRO DENPASAR

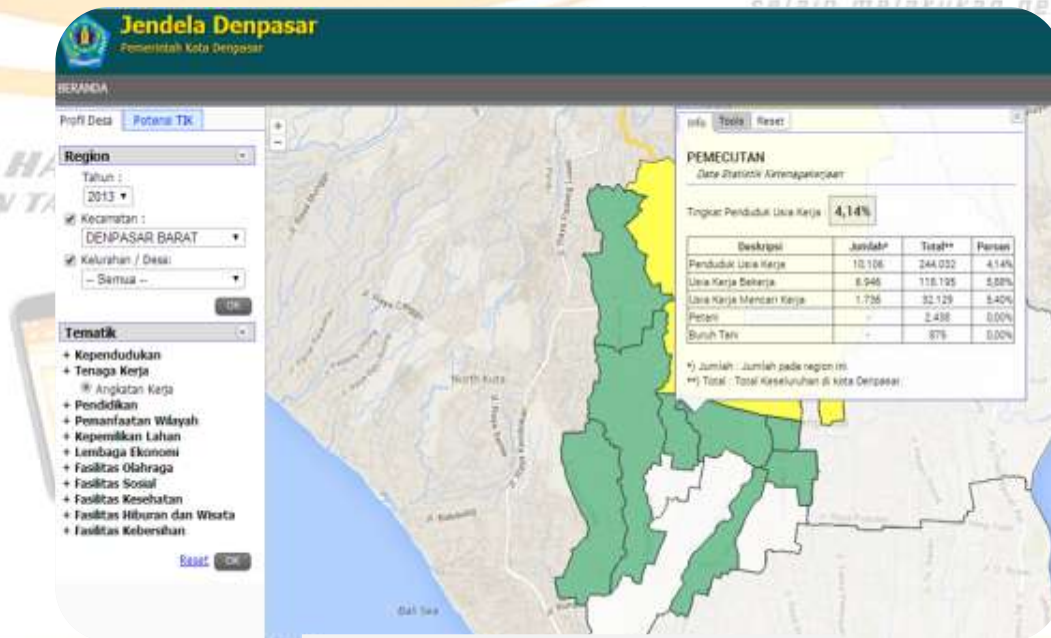
- Menjembatani Partisipasi Publik
- Integrasi pengaduan yang bersumber dari berbagai media

# JENDELA KOTA DENPASAR

DENPASAR  
SATU *genggaman*

Melalui *PRODENPASAR*-  
selain melakukan pengaduan,  
dapatkan

KINI HA  
DENGAN TA



Aparatur langsung  
mendapatkan  
nutrifikasi  
melalui mobile

<http://jendela.denpasarkota.go.id>

## JENDELA KOTA DENPASAR

- Data Potensi (Tematik) Desa/Kelurahan di masing2 Kecamatan di Kota Denpasar
- Menampilkan Data Informasi seperti Rumah Tangga Miskin (RTM), Puskesmas, LPD, Pasar, Pemukiman Kumuh berupa text dan image

Pusat Data ( Data Center) Kota Denpasar  
Berbasis GIS



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENPASAR

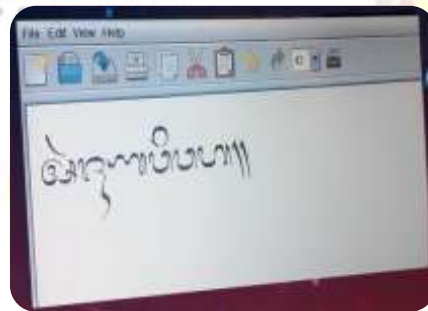
# CONTENT APPLICATION

## BIDANG PENDIDIKAN



Kini hadir PRODENPASAR+  
serlah melakukan  
Anda juga akan mendapatkan  
info Seputar Denpasar

KINI HADIR PRODENPASAR+  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Aparatur langsung  
mendapatkan  
notifikasi  
melalui mobile  
aplikasi



- Keyboard dengan interface aksara Bali
- Kominfo Kota Denpasar bekerjasama dengan Ilmu Komputer Universitas Udayana dan SMKN 1 Denpasar
- Ergonomis dan mudah digunakan
- Keyboard nirkabel dengan jangkauan 10 M
- Berjalan di lintas platform Mac, Linux, Windows
- Dilengkapi Text Editor Aksara Bali berbasis Java

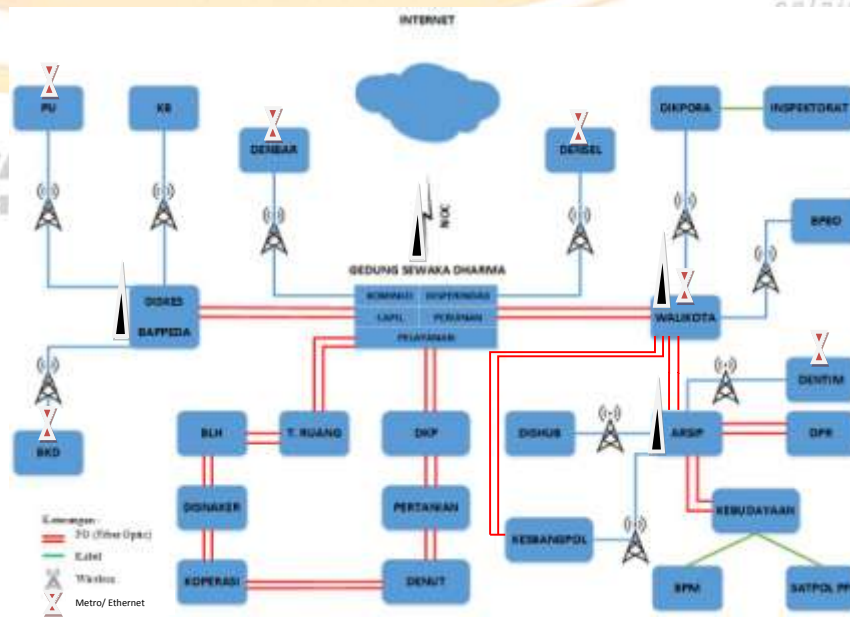


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



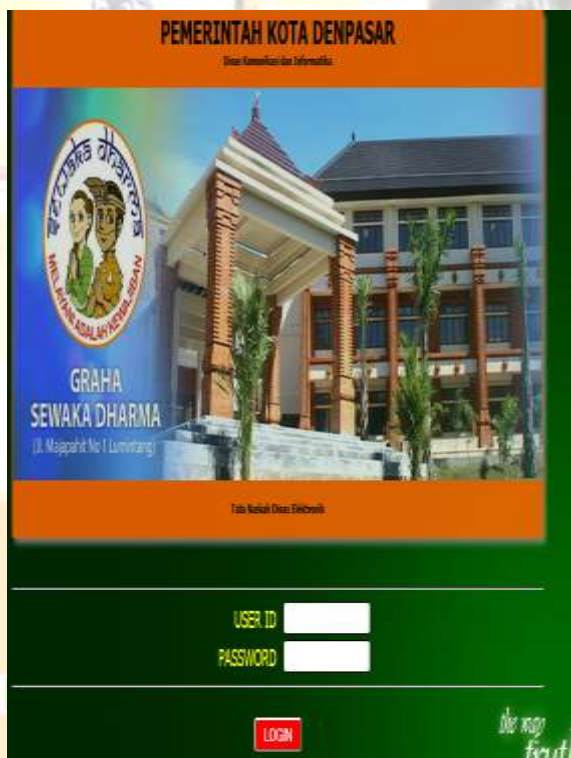
# INFRASTRUKTUR

## Penyediaan Infrastruktur Internet oleh Diskominfo



- Infrastruktur di GSD (FO & Wireless)
- Untuk Info bekerjasama dengan ATCS Dishub dan beberapa dibangun oleh Kominfo
- 19 SKPD terkoneksi FO sisanya Wireless
- Tahun 2016 dikembangkan FO ke SKPD yang belum terjangkau

(TNDE) Tata Naskah Dinas Elektronik



## Cinema Tancap( CINTA ) Denpasar

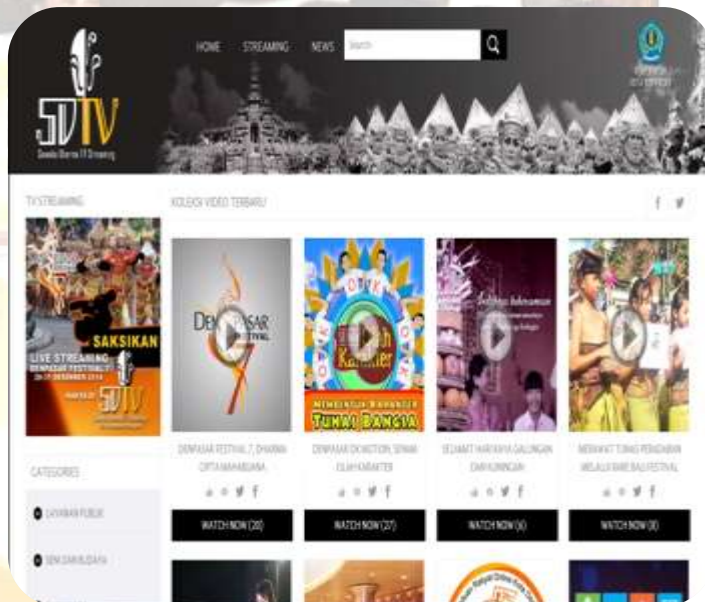


Cinema Tancap ( CINTA ) Denpasar merupakan sebutan untuk cinema tancap dengan menggunakan layar lebar dan diputar film-film dokumenter dan informasi program Pemerintah Kota Denpasar

Melalui **PRODENPASAR** selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar



## SDTV (Sewaka Dharma TV Streaming)



Sewaka Dharma TV Streaming menampilkan video kegiatan di Kota Denpasar secara live maupun rekaman video yang telah ada

## Radio Publik Kota Denpasar 92.6 FM



Radio Publik Kota Denpasar  
92.6 FM

Radio Publik Kota Denpasar melalui gelombang 92.6 FM memberikan layanan informasi menyangkut lalulintas kota Denpasar dan sekitarnya, selain itu Radio Publik Kota Denpasar menjadi sarana media kontrol masyarakat melalui program Halo Denpasar.

### Mobile Denpasar Sightseeing



**Sightseeing Denpasar Mobile** berbasis mobile android dapat di Download di Play Store / Google Play



DINAS KOMUNIKASI DAN

DENPASAR



Denpasar  
DENPASAR  
SATU genggaman

## Pelayanan Informasi Mobile



### Mobil Informasi Keliling

Melalui *PRODENPASAR* selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info *Seputar Denpasar*



Menginformasikan peraturan-peraturan pemkot Denpasar

Contoh :

Untuk tidak membuang atau menaruh sampah sembarangan, menghimbau masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan serta memberikan informasi perijinan yang berlaku di pemkot Denpasar.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



## Mobile Community Acces Point (MCAP)



Melalui **PRODENPASAR** selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar



Dinas Kominfo Kota Denpasar melalui Mobile Coommunity Acces Point menyediakan layanan internet gratis bagi masyarakat.

### Jadwal M-CAP

- Sabtu, di depan Rumah Pintar Pukul 10.00 Wita
- Minggu di depan Pura Jagatnata Pukul 16.00 Wita
- Permintaan layanan M-CAP dari SKPD



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



## Mobil Sound Keliling



Denpasar eMart city  
**DENPASAR**  
SATU genggaman



Melalui **PRODENPASAR** selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar



Untuk membantu kegiatan pemerintah kota denpasar, diskominfo menyediakan fasilitas peralatan sound system yang siap setiap saat apabila diperlukan dengan mobil sound system.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



## Mobil Relay (OB VAN)



Melalui **PRODENPASAR** selain melakukan pengaduan, Anda juga akan mendapatkan info Seputar Denpasar



Aparatur langsung mendapatkan notifikasi melalui mobile application

RESPON CEPAT APARATUR DENGAN **PRODENPASAR**

Mobil Relay (OB VAN) Adalah Fasilitas “Layanan bergerak” yang Digunakan untuk Siaran Langsung / Reportase



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



## Rekapitulasi Data Menara Telekomunikasi di Kota Denpasar

Tahun 2015



### DATA REKOMENDASI MENARA TELEKOMUNIKASI Kominfo Kota Denpasar :

Nama Perusahaan	Jumlah Rekom	GreenField	Rooftop
PT Tower Bersama Group	51	2	49
PT Wideband	13	2	11
PT Bali Towerindo	12	12	0
PT Solusindo Tunas Pratama	3	1	2
PT Indosat	1	1	0
PT Retower	14	0	14
PT Bali Telekomunikasi	1	0	1
PT Protelindo	69	12	57
PT Mitratel	13	0	13
PT Dayamitra	7	0	7
PT Global Indonesia Komunikatama	9	1	8
Jumlah	193	31	162

### 3.5 PENGHARGAAN KOMINFO TAHUN 2015

Penghargaan - Penghargaan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2015 berdasarkan kinerja sebagai berikut :

1. Piagam Penghargaan Web Kota Terbaik.



2. Piagam Penghargaan Web Kota Tervavorit Pilihan Pembaca.



### 3. Web Kota Terbaik



### 4. Piagam Penghargaan Juara Tiga Lomba Pengelolaan Arsip



5. Tri Hita Karana Award 2015 Kategori Gold untuk Graha Sewaka Dharma



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain menjadi media atau alat komunikasi pertanggungjawaban berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban LAKIP juga dapat digunakan sebagai sarana introspeksi diri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar. LAKIP juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Hal tersebut dapat diukur dari Hasil Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengembangkan terobosan yang bersifat Inovasi yang terkait dengan informasi dan Komunikasi dengan pencapaian sasaran yang diukur dari beberapa Indikator Kinerja Utama antara lain :

1. Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar sebesar 100%
2. Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar sebesar 100%
3. Persentase penerapan e-government / aplikasi pemerintah sebesar 100%
4. Jumlah sistem informasi / aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun sebesar 100%
5. Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 100%
6. Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika sebesar 100%
7. Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK sebesar 300%

Sedangkan kalau ditinjau dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 penyerapan anggaran mencapai 85,06%

#### 4.2 Saran

Upaya yang dilakukan agar meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan tujuan organisasi.
2. Melakukan penghitungan dengan lebih cermat terkait dengan penetapan besarnya anggaran

**KINI HADIR PRODENPASAR+  
DENGAN TAMBAHAN FITUR-FITUR BARUNYA**



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Denpasar

I Dewa Made Agung, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19660525 199303 1 010



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

